

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Anwar, Arifin. 2006. *Pencitraan Dalam Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- , 2009. *Komentar atas undang-undang Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2011. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al marsudia, subandi. 2001. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- C.S.T Kansil & Christin S.T. Kansil. 2007. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawan, Ikhsan. *Membongkar Problematika dalam Pemilu*. Depok: Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI
- Dodi Haryadi, Acmad, 2012. *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, konsolidasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, A. Mukthie. 2013. *Pemilu perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press
- Haris Syamsudin, 2005. *Mengapa Pilkada Langsung*. Jakarta: Majalah Bulanan Pamong Edisi 01/TH II/ Mei 2005.
- Huda, Ni'Mantul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia

- Kurnia Rizkiansyah, Ferry. 2007. *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: CV Alia Grafika
- M.Gaffar, Jenedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama Cetakan ke-4).
- Mahmud MD ,Moh.2012. *membangun politik hukum, menegakan konstitusi Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia* ,Jakarta:Pustaka LP3ES.
- Melfa,Wendy. 2013. *Pemilukada Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: BE Press
- M. Hardjana,Agus . 1994. *Konflik di Tempat Kerja*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nurdiaman,Aa. 2007. *pendidikan kewarganegaraan :kecakapan berbangsa dan bernegara*. Jakarta: PT Grafindo Media
- Suharizal. 2011. *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardja,Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafik
- Supriyanto,Didik. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta
- Thalib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Yuhana, Abdy.2009. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokus media.

INTERNET

http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/2240_Tannas%20Nov%202013_Sudirman.pdf, diakses 10 mei 2014, jam 13.30 wib

http://www.academia.edu/1891567/MODEL_RESOLUSI_KONFLIK_PILKADA, diakses 10 mei, jam 13.00 wib

<http://qsukri.blogspot.com/2007/05/waspadalah-waspadalah.html>, diakses 16 april 2014, jam 15.00 wib

http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/2197_SUDIRMAN-OPTIMALISASI%20PERAN%20ELIT%20POLITIK.pdf

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.